

Community Empowerment Based on Local Economy in Balongdowo Village, Candi District, Sidoarjo Regency

[Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Lokal Di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo]

Oriza Satyva¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. The purpose of this study was to analyze and describe efforts to empower the community's economy through a local economic approach according to three main aspects of Hutomo's theory, namely resources, infrastructure, and capital. The research method applied is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate findings, namely first, from the aspect of human and natural resources, MSME actors have promoted on social media to introduce MSME products and the village government helps MSME actors in administrative matters such as issuing business certificates. Second, from the aspect of facilities and infrastructure, MSME actors make processed products for out-of-town shipping and receive capital assistance from the cooperative office. Third, from the aspect of capital, MSME actors in building a business use personal capital supplemented by capital from external parties and marketing is carried out offline and online.

Keywords - community empowerment, Hutomo's theory, local UMKM

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi lokal menurut tiga aspek utama teori Hutomo, yaitu sumber daya, sarana prasarana, dan permodalan. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan, yaitu pertama, dari aspek sumber daya manusia dan alam, pelaku UMKM sudah melakukan promosi di media sosial untuk mengenalkan produk UMKM dan pemerintah desa membantu para pelaku UMKM dalam hal administratif seperti mengeluarkan surat keterangan usaha. Kedua, dari aspek sarana dan prasarana, pelaku UMKM membuat produk olahan untuk pengiriman luar kota dan mendapat bantuan modal dari dinas koperasi. Ketiga, dari aspek permodalan, pelaku UMKM dalam membangun usaha menggunakan modal pribadi yang ditambah dengan modal dari pihak eksternal dan pemasaran dilakukan secara offline dan online.

Kata Kunci – pemberdayaan masyarakat, teori Hutomo, UMKM lokal

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat di Indonesia. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berbagai pihak telah merancang dan menerapkan beragam upaya untuk mengatasi kemiskinan, baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemerintah, misalnya, telah mengeluarkan kebijakan serta program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sisi lain, sektor swasta dan LSM turut berperan aktif dalam memberikan pendampingan, pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas guna meningkatkan kemandirian masyarakat. Melalui sinergi antara berbagai elemen tersebut, diharapkan angka kemiskinan dapat terus berkurang secara signifikan, sehingga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia meningkat secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang berfokus pada penguatan kapasitas individu dan komunitas. Menurut Hidayat, dkk. (2025), pemberdayaan merupakan cara penguatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat

dalam mencapai keberhasilannya [1]. Hal ini sejalan dengan pendapat Ramadani (2020), yang menyatakan bahwa pemberdayaan atau *empowerment* adalah konsep yang berkembang dalam ilmu sosial, di mana masyarakat diberdayakan melalui dua pendekatan utama [2]. Pertama, pemberdayaan primer, yang berfokus pada pengalihan kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar mereka lebih mandiri. Kedua, pemberdayaan sekunder, yang menekankan pada stimulasi, dorongan, dan motivasi agar individu dapat menentukan pilihan hidupnya secara lebih mandiri.

Menurut Haslinah, dkk. (2023), pemberdayaan masyarakat mencakup penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan komunitas [3]. Sejalan dengan hal ini, Halil (2022) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian publik karena dinilai sebagai pendekatan efektif dalam mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan [4]. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara berkelanjutan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu mengubah tatanan hidup ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera, dan maju. Salah satu regulasi yang mengatur pemberdayaan masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 juga mengatur pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari strategi pembangunan desa berkelanjutan. Untuk mendukung pemberdayaan tersebut, salah satu fokus utama adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pemahaman mengenai klasifikasi UMKM menjadi penting guna merancang strategi pemberdayaan yang tepat sasaran sesuai dengan skala dan kapasitas usaha yang dimiliki masyarakat desa. Adapun kategori UMKM di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut.

Tabel 1
Kategori UMKM Di Indonesia

Kategori	Omzet/Tahun	Modal Usaha	Jumlah Unit Usaha	Percentase
Usaha Besar	> Rp 50 Miliar	> Rp 50 Miliar	5.550	0,01%
Usaha Menengah	Rp 15 M – Rp 50 Miliar	Rp 500 Juta – Rp 10 Miliar	44.728	0,08%
Usaha Kecil	Rp 300 Juta – Rp 15 Miliar	Rp 50 Juta – Rp 500 Juta	193.959	0,3%
Usaha Mikro	Maks. Rp 300 Juta	Maks. Rp 1 Miliar	63.955.369	99,62%

Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara [5]

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM mendominasi sektor usaha di Indonesia, dengan usaha mikro sebagai kategori terbesar, mencapai 63,9 juta unit usaha atau 99,62% dari total usaha yang ada. Selanjutnya, usaha kecil berjumlah 193.959 unit (0,30%), diikuti oleh usaha menengah sebanyak 44.728 unit (0,06%), dan usaha besar hanya 5.550 unit (0,01%). Dilain sisi dapat dilihat berdasarkan segi kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia sebagai berikut.

Tabel 2
Jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Kecamatan	2022	2023	2024
1	Buduran	5336	5374	4252
2	Candi	10167	10247	10333
3	Gedangan	7886	7929	6425
4	Jabon	4813	4834	4844
5	Krembung	10293	10329	11680
6	Krian	12958	13016	10283
7	Porong	6369	6403	8775
8	Prambon	4215	4243	4907
9	Sedati	6557	6608	5447
10	Sidoarjo	21390	21503	21552
11	Sukodono	5377	5416	5391

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

12	Taman	8367	8673	6621
13	Tanggulangin	11589	11647	10082
14	Tarik	3771	3795	7943
15	Tulangan	8706	8762	8698

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo [6]

Penelitian ini dilakukan di Desa Balongdowo yang terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dari website opendata.sidoarjokab.go.id, tercatat jumlah UMKM tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 151.399 UMKM. Dimana UMKM di Sidoarjo ini setiap tahunnya melakukan inovasi dengan perkembangan digitalisasi yang setiap tahunnya akan semakin meningkat. Kabupaten Sidoarjo juga mengalami perkembangan pesat karena potensi pariwisata, industri, perdagangan, serta UMKM yang ada di wilayahnya yaitu salah satunya sektori perikanan seperti pertambakan ikan bandeng dan udang windu, serta kampung nelayan kupang yang dikelola dengan baik dan terarah. Hingga dibangun Bursa Kupang yang menampung 33 kios UMKM pedangan makanan lontong kupang khas Sidoarjo di daerah Gedangan. Di lain sisi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, jumlah UMKM di Kecamatan Candi sebanyak 4.163, di mana di Desa Balongdowo sendiri berjumlah 125 UMKM yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 3
Jumlah UMKM di Kecamatan Candi, Sidoarjo Tahun 2023

Kelurahan	2023
Sumorame	153
Ngampselsari	250
Balonggabus	86
Balongdowo	125
Kendalpecabean	205
Kedungpeluk	183
Kalipecabean	292
Klurak	100
Kebonsari	370
Gelam	172
Candi	232

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo [7]

Mayoritas mata pencaharian warga Desa Balongdowo yaitu sebagai petani, pedagang, dan lain sebagainya. Namun, dari beberapa mayoritas pekerjaan warga tersebut, warga Desa Balongdowo bermata pencaharian sebagai nelayan kupang karena desa ini memiliki sungai yang langsung bermuara ke laut dan sering disebut sebagai kampung nelayan. Kupang sendiri merupakan jenis kerang yang tergolong dalam binatang lunak dan banyak ditemui di dasar perairan berlumpur atau perairan yang dekat dengan pantai. Kupang dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, mulai dari lontong kupang, petis kupang, kerupuk kupang dan olahan kupang lainnya. Sehingga, UMKM yang berkembang di desa ini lebih dominan ke arah pengelolaan SDA yang ada yaitu kupang. Adapun beberapa contoh UMKM di Desa Balongdowo yaitu argoindustri petis kupang, *home industry* kupang kering dan kupang basah, kupang krispi, telur asin Pak Poh, sentra produksi kerupuk (kerupuk puli bawang mentah), hingga produksi kerajinan tangan [8].

Desa Balongdowo memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan perekonomian warga Desa Balongdowo. Meskipun potensi ekonomi berbasis kupang di Desa Balongdowo cukup menjanjikan, hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terbentuk paguyuban atau kelompok khusus yang mewadahi pelaku UMKM kupang untuk saling berbagi pengetahuan, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkuat posisi tawar di pasar. Sejauh ini, pelaku UMKM masih berdiri sendiri-sendiri dan menjalankan usahanya secara individu. Namun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan komitmennya melalui pemberian pelatihan kepada pelaku UMKM, terutama dalam hal pengolahan produk dan pemasaran digital, pelatihan tersebut dilaksanakan pada tahun 2023 yang dihadiri oleh UMKM desa balongdowo. Selain itu, masyarakat desa masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kemajuan ekonomi mereka, yaitu pertama, minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan kupang dan lebih memilih sebagai buruh pabrik, pedagang, dll. Kedua keterbatasan akses informasi. Ketiga, kurangnya pemasaran produk UMKM.

Pemberdayaan masyarakat ini mengacu pada teori Hutomo yang menjelaskan beberapa indikator. Menurut Hutomo (2000), pemberdayaan ekonomi adalah suatu upaya untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal,

teknologi, informasi, dan pasar. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah, dengan cara membangun kapasitas dan kemandirian usaha mereka. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga mencakup peningkatan keterampilan, penguatan kelembagaan, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurut teori Hutomo (2000) untuk mencapai keberhasilan dalam usaha pemberdayaan masyarakat dibutuhkan faktor pendorong agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan. Faktor pendorong agar dapat berjalannya pemberdayaan masyarakat, antara lain: Pertama, sumber daya manusia dan alam, pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor terpenting, sedangkan sumber daya alam merupakan salah satu sumber daya yang cukup penting karena dapat dimanfaatkan untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua, permodalan, merupakan pemberian modal dengan sifat tidak menimbulkan ketergantungan kepada masyarakat, serta dapat mendorong pelaku UMKM agar usaha yang dimiliki dapat berkembang. Ketiga, prasarana produksi dan pemasaran, tumbuhnya suatu usaha diperlukan adanya prasarana produksi dan pemasaran, jika hasil produksi kemudian tidak di pasarkan akan sia-sia. Untuk itu komponen terpenting dalam pemberdayaan Masyarakat berbasis ekonomi adalah tersedianya prasarana produksi dan pemasaran produk [9].

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian oleh Yusuf dan Agustina (2023) berjudul “Produksi Kue Lokal: Pemberdayaan Pertumbuhan Ekonomi melalui Industri Kue Pia”, yang menyoroti pentingnya pengelolaan potensi desa agar tetap berkelanjutan bagi generasi berikutnya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada minimnya sumber daya manusia dalam industri lokal, di mana mayoritas tenaga kerja adalah kelompok usia lanjut yang masih memiliki keterbatasan dalam aspek teknologi dan pemasaran [10]. Selain itu, penelitian oleh Saputri, dkk. (2024) berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Pengembangan Potensi Di Desa Mantang Lama, Kabupaten Bintan”, yang juga menunjukkan kesamaan dengan penelitian kupang kurangnya partisipasi masyarakat dapat menjadi hambatan dalam keberhasilan program pemberdayaan [11]. Penelitian lain yaitu penelitian oleh Yani dan Mustamiin (2024) berjudul “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Kreatif Pada Masyarakat Dusun Montong Mesirdesa Borok Toyang” juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu pemberdayaan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi lokal seperti industri kreatif dan UMKM, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Kesamaan lain dapat dilihat dari permasalahan yang terdapat dalam dua penelitian ini yaitu kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan modal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi berbasis lokal [12]. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi lokal di Desa Balongdowo. [9]

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam mengenai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi lokal. [13] Lokasi penelitian ini berada di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga dapat mendukung pengumpulan data yang relevan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan informan dan data sekunder diperoleh berdasarkan data data yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian [14]. Wawancara dilakukan secara langsung dengan sekertaris desa Balongdowo serta pelaku UMKM Kupang, guna memperoleh informasi yang akurat terkait pemberdayaan ekonomi lokal. Teknik analisis ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data *non numeric* menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian [15]. Adapun analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu (1) Pengumpulan data (2) Reduksi data (3) Penyajian data (4) Penarikan kesimpulan [16].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan dalam artikel ini akan mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi lokal di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan pertama adalah minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan kupang, karena mereka lebih memilih pekerjaan sebagai buruh pabrik, pedagang, dan profesi lainnya yang dianggap lebih stabil. Kedua, keterbatasan akses informasi yang menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Ketiga, kurangnya pemasaran produk UMKM yang menghambat perluasan pasar dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam menganalisis ketiga permasalahan ini, digunakan teori Hutomo (2000) yang membagi pemberdayaan ekonomi ke

dalam tiga aspek utama, yaitu sumber daya, sarana prasarana, dan permodalan. Ketiga aspek ini menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat agar lebih berdaya dan berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia Dan Alam

Minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan kupang di Desa Balongdowo, Candi, Sidoarjo, merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aspek sumber daya dalam teori Hutomo (2000). Teori ini menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam pemberdayaan masyarakat, sementara sumber daya alam juga memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup [9]. Pemberdayaan nelayan kupang di Desa Balongdowo menjadi tantangan tersendiri di tengah perubahan pola kerja masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sebagian besar nelayan kupang merupakan kelompok usia lanjut, sedangkan generasi muda cenderung enggan melanjutkan profesi tersebut. Ketimpangan regenerasi ini menunjukkan belum optimalnya program pemberdayaan yang dapat menarik minat generasi muda untuk bertahan di sektor perikanan lokal. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Sekertaris Desa Balongdowo, Pak Yatim, dalam wawancaranya sebagai berikut.

“Kalau sekarang yang jadi nelayan kupang ya mayoritas orang tua. Anak-anak mudanya lebih banyak kerja di luar, ada yang ke kota, ada yang kerja di pabrik. Mereka anggap kerja di laut itu berat dan hasilnya nggak pasti. Jadi memang perlu ada pelatihan atau insentif khusus biar anak muda mau turun ke laut lagi.” (wawancara tanggal 04 Maret 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa minimnya insentif ekonomi, kurangnya pelatihan keterampilan modern, dan tidak adanya jaminan pendapatan yang stabil menjadi faktor utama yang menghambat regenerasi nelayan kupang. Selain itu, belum terdapat program khusus dari desa atau dinas terkait yang secara aktif mendorong pemberdayaan nelayan dalam bentuk pelatihan, bantuan alat tangkap, atau diversifikasi usaha berbasis hasil laut. Upaya pemberdayaan sejatinya perlu difokuskan pada pengembangan kapasitas nelayan, baik melalui pelatihan teknologi pengolahan kupang, pengelolaan hasil tangkapan secara berkelanjutan, maupun peningkatan akses terhadap pasar yang lebih luas. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, tetapi juga dapat menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor ini. Dengan menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih menjanjikan, profesi nelayan kupang diharapkan tetap eksis dan berkelanjutan di masa mendatang. Sebagai contoh konkret dari upaya adaptasi dan keberlangsungan usaha, pelaku UMKM seperti Bu Khoirun Nisa yang telah mengembangkan usaha berbasis kupang sejak tahun 2002 dan telah melakukan berbagai inovasi produk berbasis kupang, seperti kupang krispi, kupang kering, dan rengginang kupang, yang memiliki daya tahan lebih lama dan cocok untuk dipasarkan secara daring ke luar kota. Ia menjelaskan:

“Saya coba promosi lewat Facebook, WhatsApp, sama Instagram. Biar bisa dikenal banyak orang, apalagi kalau mau kirim ke luar kota, kupang kering bisa tahan sampai setahun” (wawancara tanggal 09 November 2024).

Hal tersebut menunjukkan strategi pemasaran pun disesuaikan dengan perkembangan teknologi, yaitu melalui media sosial dan platform digital agar produk dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Disisi lain, pengembangan sektor perikanan di Balongdowo, khususnya nelayan kupang, masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi potensi sumber daya alam yang dimiliki. Meskipun hasil tangkapan kupang tetap menjadi andalan, belum ada upaya serius dari pihak desa maupun instansi terkait untuk mengembangkan sistem budidaya, diversifikasi produk, atau pelatihan pengolahan hasil laut. Padahal, pengelolaan dan pengembangan berbasis sumber daya alam lokal seperti ini berpeluang besar meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Minimnya inovasi dan pendampingan menyebabkan nelayan kupang hanya bergantung pada hasil tangkapan harian yang fluktuatif dan tergantung musim. Tanpa strategi pengembangan, seperti pembentukan kelompok usaha bersama atau pelatihan pengolahan kupang menjadi produk bernilai jual tinggi, ketergantungan terhadap pola kerja tradisional akan terus berlanjut. Pak Yatim, Sekertaris Desa Balongdowo, menambahkan.

“Kalau soal pengembangan nelayan kupang, kami dari desa memang belum bisa banyak membantu, karena masih fokus pada urusan administratif. Misalnya, ya cuma bantu urus surat keterangan usaha. Tapi untuk pelatihan atau pembinaan agar mereka bisa berinovasi, itu belum ada dari kami. Kebanyakan mereka belajar sendiri.” (wawancara tanggal 04 Maret 2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dukungan pemerintah desa terhadap pengembangan nelayan kupang masih terbatas pada aspek administratif, belum menyentuh upaya peningkatan kapasitas atau pendampingan produktif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa dan dinas terkait agar potensi sumber daya alam lokal, khususnya kupang, dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan.

Gambar 1
Nelayan Menurunkan Kupang dari Perahu



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Keterbatasan dukungan tersebut terlihat dari minimnya program pelatihan atau pendampingan teknis yang diterima langsung oleh para nelayan kupang. Padahal, nelayan di kawasan ini memiliki peran penting sebagai penyedia bahan baku utama bagi pelaku UMKM pengolahan kupang. Bu Khoirun Nisa mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar nelayan kupang masih bekerja secara tradisional dan belum mendapatkan pelatihan yang memadai, baik dari desa maupun dinas terkait. Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan dan kualitas bahan baku yang ia terima sebagai pelaku usaha. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh salah satu pelaku UMKM Kupang, Ibu Khoirun Nisa, dalam wawancaranya sebagai berikut.

“Nelayan kupang sekarang kebanyakan masih pakai cara lama, jadi kalau musimnya habis atau cuacanya nggak mendukung, ya kami pelaku usaha yang kesulitan dapat bahan bakunya. Padahal kalau ada pelatihan atau pendampingan, mungkin bisa lebih stabil hasilnya,” (wawancara tanggal 09 November 2024).

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya ketergantungan antara nelayan kupang dan pelaku UMKM yang belum diimbangi dengan kebijakan pemberdayaan yang sinergis. Jika tidak segera direspon dengan strategi pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, maka potensi sumber daya lokal ini akan sulit berkembang dan keberlangsungan usaha olahan kupang juga terancam stagnasi.

Gambar 2
UMKM Kupang



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Kondisi tersebut semakin memperkuat urgensi pelatihan yang tidak hanya menasarkan nelayan sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga generasi muda yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha berbasis digital. Minimnya regenerasi dalam sektor perikanan turut berkontribusi terhadap ketidakpastian pasokan kupang bagi pelaku UMKM. Bu Khoirun Nisa mengakui bahwa meskipun promosi produk sudah memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, hingga Google Maps, pengelolaan usaha tetap mengalami tantangan ketika bahan baku sulit diperoleh dan minimnya tenaga kerja muda yang terlibat langsung dalam proses produksi.

“Awalnya menarik pelanggan dari promosi media online seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Google Maps, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dan dapat menambah pemasukan juga.” (wawancara tanggal 09 November 2024).

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa pengembangan sektor ini membutuhkan pelatihan terpadu, baik dalam aspek pengolahan, pengemasan, maupun pemasaran digital yang adaptif terhadap perubahan zaman. Tanpa adanya transfer keterampilan kepada generasi muda, keberlanjutan usaha olahan kupang akan sulit dicapai. Pelatihan

yang berbasis teknologi, inovasi produk, serta literasi digital menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antargenerasi dalam sektor pengolahan hasil laut lokal.

Dari berbagai faktor yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam aspek sumber daya menurut teori Hutomo (2000) tidak lagi semata pada ketersediaan sumber daya alam, melainkan lebih pada keterbatasan pengembangan sumber daya manusia, khususnya nelayan kupang di Desa Balongdowo. Minimnya pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan membuat para nelayan masih mengandalkan metode tradisional yang tidak efisien. Bu Khoirun Nisa, pelaku UMKM pengolahan kupang, mengungkapkan bahwa banyak nelayan belum mendapatkan pelatihan mengenai teknik pasca panen, pengawetan, ataupun pengemasan hasil laut secara layak. Lebih lanjut, ketidaktertarikan generasi muda dalam sektor ini memperparah situasi karena tidak ada regenerasi tenaga kerja yang siap diberdayakan.

Fakta di atas jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Saputri dkk. (2024), yang menyoroti pentingnya pengelolaan potensi pesisir dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Mantang Lama, Kabupaten Bintan, menunjukkan adanya relevansi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Kedua penelitian sama-sama mengakui peran strategis hasil laut sebagai komoditas unggulan daerah. Namun, letak perbedaannya ada pada tantangan sumber daya manusia. Penelitian Saputri dkk. (2024). lebih menekankan pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir, sedangkan dalam penelitian ini, masalah utamanya adalah minimnya pelatihan serta keterampilan teknis nelayan kupang, ditambah kurangnya regenerasi tenaga kerja muda yang mau terlibat di sektor ini. Artinya, meskipun sumber daya alam tersedia, pemanfaatannya tidak akan optimal tanpa didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi di wilayah pesisir tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam semata, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan.

Sarana Prasarana

Keterbatasan akses informasi menjadi salah satu kendala utama bagi pelaku UMKM di Desa Balongdowo, Candi, Sidoarjo. Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah alur informasi yang berjalan langsung dari Dinas Koperasi ke pelaku UMKM tanpa melalui desa sebagai perantara. Dalam teori [9], aspek sarana dan prasarana sangat penting dalam pertumbuhan usaha karena keberlanjutan suatu usaha tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada pemasaran [9]. Jika informasi mengenai peluang pemasaran dan produksi tidak tersampaikan dengan baik, maka usaha yang dijalankan berisiko mengalami stagnasi bahkan penurunan. Dalam wawancara dengan Sekertaris Desa Balongdowo, Pak Yatim, beliau menjelaskan:

“Permodalan awal UMKM di desa ini sepenuhnya berasal dari modal mandiri yang dimiliki oleh para pelaku usaha itu sendiri. Desa tidak pernah menyediakan dukungan permodalan, baik dalam bentuk dana maupun alat produksi. Namun, jika melihat dari skala yang lebih luas, terdapat bantuan dari pemerintah, terutama melalui dinas koperasi, yang langsung memberikan permodalan dalam bentuk uang serta peralatan usaha kepada pelaku UMKM tanpa melalui pemerintah desa sebagai perantara. Hal ini mengakibatkan informasi mengenai bantuan yang tersedia tidak selalu tersebar dengan merata di kalangan pelaku UMKM, sehingga hanya sebagian yang dapat memanfaatkannya secara optimal.” (wawancara tanggal 04 Maret 2025).

Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak memiliki peran aktif dalam mendukung permodalan maupun menjadi penghubung dalam penyebaran informasi kepada pelaku usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang kurang mendapatkan informasi yang diperlukan terkait bantuan permodalan, peluang inovasi produk, hingga strategi pemasaran yang lebih efektif. Tanpa adanya peran aktif dari desa, keterbatasan akses informasi semakin memperburuk kondisi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dan arahan lebih lanjut dalam mengembangkan bisnis mereka. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait bantuan permodalan, inovasi produk, hingga strategi pemasaran yang lebih efektif. Permasalahan akses informasi ini juga berdampak pada inovasi produk yang dilakukan oleh para pelaku UMKM [17]. Bu Khoirun Nisa, salah satu pelaku usaha di desa tersebut, menyatakan bahwa ia harus berinovasi dari produk kerupuk kupang menjadi kupang krispi, rengginang kupang, serta berbagai olahan kupang lainnya agar produk lebih tahan lama dan dapat dipasarkan ke luar kota.

“Kami juga mencoba membuat kupang kering untuk pengiriman luar kota yang kemudian diolah kembali menjadi lontong atau petis. Dengan cara ini, kami berharap produk olahan kupang bisa lebih mudah diterima di daerah lain tanpa mengalami penurunan kualitas. Namun, karena kurangnya informasi mengenai standar pengemasan yang sesuai dengan ketentuan distribusi luar daerah, kami harus mencari sendiri metode yang tepat agar kupang kering tetap segar dan memiliki daya simpan yang lebih lama.” (wawancara tanggal 09 November 2024).

Kurangnya akses informasi membuat pelaku usaha harus mencari cara sendiri untuk beradaptasi dengan permintaan pasar tanpa adanya bimbingan atau arahan yang lebih terstruktur. Jika ada pendampingan yang lebih intensif dari dinas terkait atau pihak desa dalam memberikan informasi mengenai teknik pengolahan dan distribusi,

maka produk yang dihasilkan bisa lebih kompetitif dan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar luar daerah secara optimal. Pemasaran juga menjadi tantangan utama bagi UMKM di Desa Balongdowo. Awalnya, mereka menarik pelanggan melalui promosi media online seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, serta Google Maps. Namun, keterbatasan informasi dan kurangnya pendampingan dalam strategi pemasaran digital membuat jangkauan pasar mereka masih terbatas. Padahal, menurut teori Hutomo (2000), tersedianya sarana dan prasarana pemasaran merupakan faktor krusial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan akses informasi yang lebih baik, UMKM bisa lebih memahami teknik pemasaran digital dan memperluas jangkauan pelanggan mereka.

Siklus produksi UMKM di desa ini juga tidak menentu karena bergantung pada hasil laut yang kemudian dibagikan ke pengepul sebelum sampai ke pelaku usaha. Bu Khoirun Nisa, menjelaskan:

“Produksi setiap hari belum pasti karena sangat bergantung pada hasil tangkapan laut yang diperoleh nelayan, yang kemudian didistribusikan ke pengepul sebelum akhirnya dibagi lagi oleh warga yang menjadi pelaku usaha. Terkadang, hasil tangkapan yang sedikit membuat bahan baku sulit didapatkan, sehingga proses produksi harus tertunda atau bahkan dihentikan sementara.” (wawancara tanggal 09 November 2024).

Kurangnya akses informasi mengenai pola permintaan pasar dan ketersediaan bahan baku membuat pelaku usaha kesulitan dalam menyusun strategi produksi yang lebih terstruktur. Jika ada sistem yang lebih baik untuk memantau pasokan dan distribusi bahan baku, pelaku usaha dapat merencanakan produksi dengan lebih efisien, mengurangi risiko keterlambatan, serta mengoptimalkan hasil produksi agar sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, sistem kerja yang masih berbasis keluarga tanpa pegawai tetap semakin memperumit upaya untuk mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar. Dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas dan tidak adanya struktur organisasi yang jelas, pelaku UMKM sering kali kesulitan memenuhi permintaan yang lebih besar atau melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas. Jika ada akses ke informasi dan bantuan dalam pengelolaan tenaga kerja, maka pelaku usaha dapat lebih siap menghadapi tantangan ekspansi bisnis.

Dalam aspek pendapatan dan sarana prasarana, kondisi UMKM di Desa Balongdowo masih mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Menurut Bu Khoirun Nisa, omzet per bulan yang diperoleh dari usahanya berkisar sekitar 18 juta rupiah. Namun, omzet tersebut tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh momen-momen tertentu.

“Omzet menurun saat pendaftaran sekolah karena masyarakat lebih fokus pada biaya pendidikan anak-anak mereka, tetapi meningkat saat ada hajatan dan Lebaran karena permintaan untuk katering melonjak.” (wawancara tanggal 09 November 2024).

Selain itu, usaha ini tidak memiliki pegawai tetap, melainkan hanya melibatkan sekitar 10 orang dari keluarga sendiri yang bekerja secara serabutan dari rumah masing-masing. Dalam hal sarana prasarana, ia menyatakan bahwa alat produksi yang digunakan dalam usahanya berasal dari investasi pribadi tanpa bantuan dari pihak desa. Kendati demikian, meskipun memiliki alat sendiri, keterbatasan informasi mengenai cara meningkatkan produktivitas dan pemasaran masih menjadi hambatan utama dalam perkembangan usahanya.

Gambar 3
Alat Produksi Kupang UMKM



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Berdasarkan teori Hutomo (2000), aspek sarana dan prasarana dalam pemberdayaan UMKM tidak hanya mencakup alat produksi, tetapi juga akses informasi yang mendukung pemasaran yang optimal. Jika desa lebih dilibatkan dalam distribusi informasi dari Dinas Koperasi, pelaku UMKM bisa mendapatkan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap pelatihan, peluang bantuan modal, serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem komunikasi yang lebih inklusif agar informasi tidak hanya mengalir satu arah dari pemerintah ke pelaku UMKM, tetapi juga melalui pemerintah desa sebagai fasilitator yang membantu

menghubungkan berbagai pihak. Keterbatasan akses informasi bagi UMKM di Desa Balongdowo menjadi tantangan yang signifikan dalam pengembangan usaha mereka. Dengan adanya distribusi informasi yang kurang optimal, banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Sesuai dengan teori Hutomo (2000), prasarana produksi dan pemasaran yang baik harus mencakup akses informasi yang memadai agar hasil produksi tidak hanya berhenti di tahap pembuatan, tetapi juga dapat dijual dengan strategi yang lebih efektif. Oleh karena itu, pelibatan desa sebagai jembatan informasi antara Dinas Koperasi dan UMKM perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa tersebut.

Fakta di atas jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu milik Yani dan Mustamiin (2024) mempunyai kesesuaian dalam indikator sarana prasarana. Penelitian terdahulu yang meneliti pemberdayaan ekonomi kreatif di Dusun Montong Mesirdesa Borok Toyang, menempatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi elemen penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Namun, perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus pengembangannya. Penelitian ini menyoroti keterbatasan akses informasi sebagai hambatan utama dalam optimalisasi sarana prasarana, penelitian Yani dan Mustamiin lebih menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur yang tersedia. Relevansi kedua penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang memadai bukan hanya sekadar tersedianya fasilitas fisik, tetapi juga harus didukung oleh alur informasi yang efektif agar benar-benar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Permodalan

Kurangnya pemasaran produk UMKM di Desa Balongdowo, Candi, Sidoarjo akibat keterbatasan modal merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha kecil. Dalam teori Hutomo (2000), aspek permodalan tidak hanya berfungsi sebagai pemberian dana semata, tetapi juga harus bersifat tidak menimbulkan ketergantungan serta mampu mendorong pengusaha kecil untuk berkembang secara mandiri [9]. Dengan demikian, permodalan yang diberikan harus bersifat stimulatif dan bukan hanya bantuan konsumtif, sehingga UMKM dapat memperluas jaringan pemasarannya tanpa terhambat oleh keterbatasan modal. Dalam wawancara dengan Sekretaris Desa Balongdowo, Pak Yatim, beliau menyatakan bahwa.

“Permodalan awal bagi para pelaku UMKM di desa ini sebagian besar berasal dari modal mandiri yang mereka kumpulkan sendiri. Dari pihak desa, sejauh ini belum pernah ada dukungan permodalan secara langsung, baik dalam bentuk dana maupun fasilitas lainnya. Namun, jika melihat dari pemerintah pusat maupun daerah, terdapat beberapa bentuk bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk uang maupun alat produksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Bantuan tersebut umumnya disalurkan melalui dinas koperasi yang langsung berhubungan dengan para pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal untuk mengembangkan usaha mereka.” (wawancara tanggal 04 Maret 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa permodalan yang diterima UMKM di desa tersebut lebih banyak berasal dari pemerintah pusat dan lembaga tertentu, bukan dari tingkat desa. Dengan kata lain, meskipun terdapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana atau alat produksi, namun dukungan tersebut belum berasal dari tingkat pemerintahan desa, yang seharusnya juga memiliki peran dalam membantu pertumbuhan UMKM lokal. Keterbatasan dukungan dari pemerintah desa ini dapat menyebabkan akses permodalan menjadi lebih sulit bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan bantuan segera untuk mengembangkan bisnis mereka [18]. Oleh karena itu, penguatan permodalan di tingkat desa perlu diperhatikan dengan serius agar desa dapat berkontribusi secara langsung dalam memberikan akses lebih luas kepada pelaku UMKM, baik melalui kebijakan lokal, skema bantuan yang lebih terstruktur, ataupun program pendampingan yang berkelanjutan. Dengan adanya peran yang lebih aktif dari desa, UMKM akan memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran produk mereka.

Permodalan yang memadai sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM, baik dalam meningkatkan kapasitas produksi maupun dalam memperluas pasar. Salah satu contoh nyata adalah pengalaman yang dialami oleh Bu Khoirun Nisa, seorang pelaku UMKM di desa tersebut. Ia menyatakan bahwa dengan adanya tambahan modal, usahanya dapat berkembang lebih jauh.

“Setelah ada tambahan modal, usaha saya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Awalnya, kami hanya mengandalkan modal sendiri untuk menjalankan produksi, tetapi dengan hasil yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya bisa ditingkatkan untuk membeli berbagai mesin produksi. Saat ini, kami sudah memiliki 10 mesin yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dari jumlah tersebut, 7 mesin diperoleh dari hasil keuntungan usaha yang kami kumpulkan secara mandiri, sedangkan 3 mesin lainnya merupakan bantuan dari PLN Sidoarjo.” (wawancara tanggal 09 November 2024).

Gambar 4
Alat Produksi Bantaun PLN Sidoarjo



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Bantuan modal yang diterima ini membuktikan bahwa ketika UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih baik, mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan secara bertahap mengembangkan usaha mereka. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa beberapa bantuan yang diterima berasal dari sponsor melalui pengajuan proposal dalam program kampung Kupang dan bantuan UMKM Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa permodalan dapat diperoleh dari berbagai sumber, dan pelaku UMKM yang aktif mencari peluang bisa mendapatkan dukungan finansial yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah pergeseran bahan baku yang berpengaruh terhadap produksi dan pemasaran. Bu Khoirun Nisa juga mengungkapkan:

“Sekarang nelayan lebih banyak mengambil kupang merah dibandingkan dengan kupang putih. Hal ini terjadi karena pasokan kupang putih sudah banyak disuplai ke berbagai tempat, sehingga jumlah yang tersedia untuk diproses oleh pelaku UMKM di desa ini menjadi lebih sedikit. Akibatnya, kami harus menyesuaikan bahan baku yang digunakan dalam produksi dan mencari strategi baru agar tetap bisa memenuhi permintaan pasar.” (wawancara 09 November 2024).

Pergeseran ini mempengaruhi variasi produk yang ditawarkan dan menuntut UMKM untuk menyesuaikan strategi pemasarannya. Oleh karena itu, bantuan modal yang diberikan sebaiknya juga mencakup aspek inovasi dalam pemasaran agar produk tetap kompetitif di pasaran. Permodalan yang tepat akan sangat membantu dalam membangun sistem pemasaran yang lebih efektif. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yatim:

“Pemasaran produk UMKM di desa ini dilakukan dengan dua metode utama, yaitu secara offline melalui penjualan langsung kepada pelanggan di pasar atau toko lokal, serta secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial dan marketplace untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.” (wawancara tanggal 04 Maret 2025).

Pendekatan online yang sudah diterapkan oleh beberapa pelaku usaha di desa ini menunjukkan bahwa digitalisasi bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan pemasaran akibat modal yang minim. Namun, tanpa adanya pendampingan dan permodalan yang berkelanjutan, tidak semua UMKM dapat secara optimal memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran mereka. Berdasarkan teori Hutomo (2000), permodalan yang diberikan kepada UMKM sebaiknya bersifat mendukung kemandirian pelaku usaha agar mereka tidak bergantung pada bantuan secara terus-menerus. Dalam konteks Desa Balongdowo, solusi permodalan yang dapat diterapkan adalah skema dana bergulir, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan pemasaran digital agar UMKM dapat lebih mandiri dalam memasarkan produknya. Dengan begitu, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat berkembang lebih jauh dan meningkatkan daya saingnya di pasar yang lebih luas. Keterbatasan modal menjadi faktor utama dalam permasalahan pemasaran UMKM di Desa Balongdowo. Namun, dengan pendekatan permodalan yang sesuai dengan teori Hutomo (2000), yaitu tidak menimbulkan ketergantungan tetapi mendorong pertumbuhan, UMKM dapat berkembang secara lebih mandiri. Dukungan permodalan harus mencakup tidak hanya dana, tetapi juga alat, pelatihan, serta strategi pemasaran berbasis digital agar produk-produk UMKM di desa ini dapat lebih dikenal dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Fakta di atas jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, sejalan dengan penelitian oleh Yani dan Mustamiin (2024) yang menyoroti pentingnya permodalan dalam pemberdayaan ekonomi kreatif di Dusun Montong Mesirdesa Borok Toyang. Penelitian dahulu menunjukkan bahwa tanpa permodalan yang cukup, UMKM sulit untuk berinovasi dan memperluas jaringan pemasaran. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan permodalan antara dua studi. Di dalam penelitian ini, bantuan modal lebih banyak berasal dari pemerintah pusat dan lembaga tertentu, sementara pada studi Yani dan Mustamiin (2024), pendekatan yang digunakan lebih bersifat partisipatif dengan mendorong kolaborasi antara UMKM dan komunitas lokal. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian menunjukkan relevansi dalam menyoroti pentingnya permodalan, perbedaan dalam metode implementasi menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga pada strategi distribusi dan pemanfaatan yang tepat.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokal di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dilihat dari kacamata teori Hutomo yang mencakup pemberdayaan ekonomi ke dalam tiga aspek utama, yaitu sumber daya, sarana prasarana, dan permodalan memberikan kerangka yang relevan untuk menganalisis permasalahan ini. Aspek pertama, sumber daya manusia dan alam, pemerintah desa dan pelaku UMKM sudah melakukan promosi di media sosial untuk mengenalkan produk UMKM dan pemerintah desa membantu para pelaku UMKM dalam hal administratif seperti mengeluarkan surat keterangan usaha. Namun pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balongdowo tetap menghadapi berbagai tantangan, yaitu rendahnya minat generasi muda untuk melanjutkan profesi sebagai nelayan kupang. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola ekonomi masyarakat yang lebih memilih pekerjaan di sektor industri karena dianggap lebih stabil secara finansial. Akibatnya, regenerasi tenaga kerja di sektor perikanan menjadi sulit, yang berpotensi mengancam keberlanjutan usaha berbasis kupang di desa ini.

Aspek kedua, sarana dan prasarana, pelaku UMKM telah membuat produk olahan untuk pengiriman luar kota dan mendapat bantuan modal dari dinas koperasi berupa uang dan peralatan usaha untuk membantu permodalan. Namun, sarana dan prasarana juga menghadapi tantangan bagi pelaku UMKM di Desa Balongdowo dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam hal akses informasi. Sistem informasi yang langsung dari Dinas Koperasi ke pelaku UMKM tanpa melalui pemerintah desa menyebabkan penyebaran informasi yang tidak merata. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan informasi terkait bantuan permodalan, inovasi produk, serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Tanpa adanya peran aktif dari desa sebagai perantara informasi, banyak UMKM yang mengalami stagnasi dalam pengembangan usaha mereka.

Aspek ketiga, permodalan, pelaku UMKM dalam membangun usaha menggunakan modal pribadi yang ditambah dengan modal dari pihak eksternal dan pemasaran dilakukan secara offline dan online. Permodalan juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan permodalan yang tersedia lebih banyak berasal dari pemerintah pusat dan lembaga tertentu. Namun, permodalan yang diberikan sebaiknya tidak hanya berbentuk dana hibah, tetapi juga harus dirancang agar tidak menimbulkan ketergantungan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, skema bantuan modal yang lebih berkelanjutan, seperti dana bergulir, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan pemasaran digital, sangat diperlukan agar UMKM dapat berkembang secara mandiri dan meningkatkan daya saingnya. Secara keseluruhan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balongdowo memerlukan sinergi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah desa, dinas terkait, hingga partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik dalam penyebaran informasi, permodalan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi pemasaran yang lebih optimal, diharapkan UMKM di desa ini dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Pemberdayaan berbasis ekonomi lokal bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.

REFERENSI

- [1] A. Hidayat, G. N. Sanjaya, H. B. Yasin, and Soekatmo, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Merauke," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 17, no. 1, pp. 210–225, 2025.
- [2] D. M. Ramadani, "Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur," *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 8, no. 3, 2020.
- [3] A. Haslinah, U. Tahir, H. Al Imran, A. Asfahani, and Z. Larisu, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Lingkungan Hijau Bebas Polusi Di Kota Makassar," *Community Dev. J. J. Pengabdi. Masy.*, vol. 4, no. 4, pp. 8906–8912, 2023, [Online]. Available: <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/20062>.
- [4] H. Halil, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep," *Ibrah J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 99–112, 2022, doi: 10.47766/ibrah.v1i2.1024.
- [5] Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Website DJKN Kemenkeu RI," www.djkn.kemenkeu.go.id, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> (accessed Jun. 20, 2025).
- [6] Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, "Jumlah usaha Mikro Menurut Kecamatan Tahun 2022 - 2024," opendata.sidoarjokab.go.id, 2025. <http://opendata.sidoarjokab.go.id/dataset/jumlah-usaha-mikro-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sidoarjo/resource/575c2b07-14b8-4272-9e64-5ab897a7a611> (accessed Jun. 20, 2025).
- [7] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, "Kecamatan Candi Dalam Angka 2023," sidoarjokab.bps.go.id, 2023. <https://sidoarjokab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/3f30cc76a1daa6f666225595/kecamatan-candi-dalam-angka-2023.html> (accessed Jun. 20, 2025).
- [8] Y. Arisky and H. E. Satriya, "Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Kupang Di Desa

- Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 1990-2020,” *J. Pendidik. Sej.*, vol. 12, no. 4, pp. 1–9, 2022.
- [9] M. Y. Hutomo, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi,” Bappenas, Jakarta, 2000.
- [10] L. A. Yusuf and I. F. Agustina, “Local Pastry Production: Empowering Economic Growth through Pia Cake Industry,” *Indones. J. Innov. Stud.*, vol. 23, pp. 10–21070, 2023.
- [11] S. Saputri, F. Dwi Putri, O. Mustari, A. Riyadi, S. Khatijah, and S. Wahyuni, “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Pengembangan Potensi Di Desa Mantang Lama, Kabupaten Bintan,” *J. Sosiol. Nusant.*, vol. 10, no. 1, pp. 103–123, 2024, doi: 10.33369/jsn.10.1.103-123.
- [12] A. Yani and M. Z. Mustamiin, “IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KREATIF PADA MASYARAKAT DUSUN MONTONG MESIRDESA BOROK TOYANG,” *J. Ilm. Rinjani*, vol. 12, no. 1, pp. 48–55, 2024.
- [13] Y. Rifa'i, “Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset,” *Cendekia Inov. Dan Berbudaya*, vol. 1, no. 1, pp. 31–37, 2023.
- [14] R. Asrulla, M. S. Jailani, and F. Jeka, “Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 3, pp. 26320–26332, 2023.
- [15] Y. Tojiri, H. S. Putra, and N. Faliza, *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023.
- [16] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative data analysis a methods sourcebook*, 3rd ed. California: SAGE Publications, 2014.
- [17] R. H. Nugroho and S. Andarini, “Strategi pemberdayaan UMKM di pedesaan berbasis kearifan lokal di era industri 4.0 menuju era society 5.0,” *J. Bisnis Indones.*, vol. 1, no. 01, 2020.
- [18] N. Chairina, Y. Muhayati, F. Fawwaz, M. H. Amelianur, and R. Aldiansyah, “STRATEGI PEMASARAN UMKM DESA PARIGI,” *GANESHA J. Pengabdi. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 229–237, 2025.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.